

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tekanan politik memengaruhi independensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menggali dinamika yang terjadi di internal Bawaslu melalui wawancara mendalam serta dokumentasi terhadap sejumlah peristiwa penting yang berkaitan dengan laporan pelanggaran pemilu. Teori institusionalisme sosiologis dari DiMaggio dan Powell digunakan sebagai kerangka analisis, khususnya dalam menjelaskan mekanisme isomorfisme koersif, normatif, dan mimetik yang memengaruhi perilaku lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan dari aktor politik lokal, kedekatan personal antar jejaring organisasi, serta ketidakpastian regulatif turut menciptakan kerentanan terhadap independensi Bawaslu. Dalam beberapa kasus, keputusan Bawaslu dinilai tidak netral dan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran, yang diduga dipengaruhi oleh relasi kepentingan tertentu. Temuan ini menyoroti pentingnya reformasi struktural dalam mekanisme rekrutmen, penguatan profesionalisme internal, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan transparansi, perlindungan hukum terhadap pengawas, dan pendidikan politik sebagai strategi menjaga integritas demokrasi lokal di tengah ancaman politisasi kelembagaan.

Kata Kunci: Bawaslu, tekanan politik, Pemilu 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze how political pressure influences the independence of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Bandung City during the 2024 General Election. Using a qualitative approach and case study method, the research investigates internal institutional dynamics through in-depth interviews and documentation of key events related to electoral violation reports. The theoretical framework is based on DiMaggio and Powell's sociological institutionalism, particularly focusing on coercive, normative, and mimetic isomorphism mechanisms that shape organizational behavior. The findings reveal that political pressure from local actors, personal networks among organizations, and regulatory uncertainty significantly undermine Bawaslu's institutional autonomy. In several instances, Bawaslu's decisions appeared biased and failed to act on public reports of violations, allegedly due to underlying political affiliations. These results underscore the urgent need for structural reform in recruitment mechanisms, the strengthening of internal professionalism, and active civil society engagement in monitoring election oversight bodies. The study recommends improving transparency, providing legal protection for election supervisors, and expanding political education as key strategies to safeguard democratic integrity at the local level against institutional politicization.

Keywords: *Bawaslu, political pressure, 2024 General Election*